



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
SEKRETARIAT DAERAH

PERUBAHAN PENETAPAN
INDIKATOR KINERJA UTAMA
BIRO ORGANISASI

Padang, 2020

PERUBAHAN PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

Nama Perangkat Daerah : Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat

Tugas Pokok : Menyiapkan perumusan kebijakan, pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah dibidang kelembagaan, analisis jabatan, pendayagunaan aparatur, reformasi birokrasi, akuntabilitas kinerja, tatalaksana, pelayanan publik serta pengelolaan kepegawaian Sekretariat Daerah.

Fungsi : a. Penyelenggaraan perumusan kebijakan daerah dibidang kelembagaan, analisis jabatan, reformasi birokrasi, akuntabilitas kinerja, tata laksana dan pelayanan publik.

b. Penyelenggaraan pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kelembagaan, analisis jabatan, reformasi birokrasi, akuntabilitas kinerja, tata laksana dan pelayanan publik.

c. Penyelenggaraan pelaporan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah dibidang kelembagaan, analisis jabatan, reformasi birokrasi, akuntabilitas kinerja, tata laksana dan pelayanan publik.

d. Penyelenggaraan pengelolaan kepegawaian sekretariat daerah.

Indikator Kinerja Utama

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Baseline (2015)	Formula Perhitungan/Penjelasan	Sumber Data
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	70,52	Diukur berdasarkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja yang dikeluarkan oleh Kementerian PAN dan RB pada tahun berjalan	KemenPAN RB
1.1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	Jumlah OPD yang memiliki nilai evaluasi SAKIP A		Diukur berdasarkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja yang dikeluarkan oleh Inspektorat Provinsi	Inspektorat Provinsi
1.2	Meningkatnya Kualitas Laporan Kinerja Pemda	Nilai Komponen Pelaporan Kinerja Pemda	11,27	Diukur berdasarkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja komponen pelaporan kinerja yang dikeluarkan oleh Kementerian PAN dan RB pada tahun berjalan	KemenPAN RB
2	Meningkatnya Kelembagaan yang Tepat Fungsi dan Tepat Ukuran.	Jumlah OPD yang tepat fungsi dan tepat ukuran		Diukur berdasarkan jumlah OPD yang tepat fungsi dan tepat ukuran	Bag. Kelembagaan
2.1	Meningkatnya Penataan Perangkat Daerah yang sesuai aturan perundang-undangan kelembagaan	Persentase OPD yang pembentukannya sesuai perundang-undangan kelembagaan		Besaran Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat ditentukan berdasarkan Variabel, Variable dan Indikator dari masing-masing urusan	
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik.	Rata-rata IKM		Data dan Informasi yang digunakan untuk mengetahui jumlah inovasi yang diciptakan pada Unit Penyelenggara Pelayanan Publik di lingkungan Pemerintah Provinsi untuk terwujudnya Pelayanan Publik yang prima	Bag. Tatalaksana

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Baseline (2015)	Formula Perhitungan/Penjelasan	Sumber Data
3.1	Meningkatnya Inovasi Pelayanan Publik	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik yang diciptakan		Inovasi Pelayanan Publik adalah suatu cara atau sistem pelayanan yang diselenggarakan oleh Unit Kerja Penyelenggara Pelayanan Publik (UKP3) kepada masyarakat dalam rangka melaksanakan pelayanan publik yang efektif dan efisien sehingga dapat memberikan kepuasan pada masyarakat.	
3.2	Meningkatnya Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik	Jumlah Pengaduan Pelayanan Publik yang ditindaklanjuti		Diukur berdasarkan laporan yang masuk pada system SP4N LAPOR dan yang ditindaklanjuti oleh Pejabat Penghubung OPD terkait	

Padang, Januari 2020
KEPALA BIRO ORGANISASI



AHMAD ZAKRI, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
Nip. 19730524 199303 1 003